

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena berperan penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperluas akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang selama ini masih menjadi tantangan pembangunan nasional (Diah, 2020).

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, kemajuan desa menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana publik lainnya berperan penting dalam meningkatkan produktivitas serta memperluas peluang ekonomi masyarakat desa. Pembangunan desa yang berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perekonomian lokal dan daya saing nasional (Suhardi, 2025).

Untuk mendukung percepatan pembangunan di tingkat desa, pemerintah meluncurkan kebijakan Dana Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer langsung ke rekening desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Gatot, 2025). Melalui mekanisme ini, desa dapat menentukan prioritas pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokalnya. Secara umum, arah kebijakan Dana Desa difokuskan pada tiga bidang utama, yaitu pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga desa. Sektor infrastruktur menjadi prioritas karena dampaknya yang langsung terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Dengan dukungan Dana Desa, banyak desa membangun sarana fisik seperti jalan, irigasi, saluran air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi kendala seperti terbatasnya kemampuan teknis aparatur desa, lemahnya perencanaan berbasis data, serta kurang optimalnya pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dan sistem tata kelola agar Dana Desa dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan.

Kabupaten Banyuwangi, sebagai salah satu daerah di ujung timur Pulau Jawa, dikenal memiliki inovasi tinggi dalam tata kelola pemerintahan. Melalui berbagai program berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat, seperti Smart Kampung, Banyuwangi berupaya memperkuat transparansi dan efektivitas layanan publik hingga ke tingkat desa (Nurharibnu, 2021). Namun demikian, capaian di tingkat kabupaten belum sepenuhnya merata, karena setiap desa memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda, termasuk Desa Sempu sebagai fokus kajian ini.

Meskipun Dana Desa telah mendorong peningkatan pembangunan di berbagai sektor, implementasinya masih menghadapi tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia desa, kurangnya pemahaman administrasi dan teknis, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan menjadi persoalan yang sering muncul. Akibatnya, beberapa program pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan masih ditemukan kendala dalam hal akuntabilitas serta keberlanjutan hasil pembangunan.

Desa Sempu, yang berada di Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang cukup besar. Dana Desa telah dimanfaatkan untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas umum (Yully & al., 2024). Namun, Kajian mengenai pelaksanaan Dana Desa di Desa Sempu masih terbatas, Karena sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas pengelolaan Dana Desa secara umum, akuntabilitas keuangan, atau pemberdayaan masyarakat di desa lain, sehingga belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sempu dengan menelaah proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. padahal setiap desa memiliki

dinamika sosial dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali beberapa aspek utama, seperti:

1. Efektivitas pelaksanaan kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sempu;
2. Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan;
3. Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga desa dalam pengawasan penggunaan Dana Desa; serta
4. Dampak pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan desa dalam konteks desentralisasi fiskal. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan kabupaten untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan Dana Desa agar lebih efektif dan akuntabel.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Dana Desa diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sempu serta sejauh mana hasilnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa, sehingga Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan pendorong pembangunan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana implementasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sempu Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sempu Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang desentralisasi fiskal dan pembangunan berbasis masyarakat di tingkat desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori tentang tata kelola pemerintahan desa dan efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi:

1. Pemerintah Desa Sempu, untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa agar lebih transparan dan tepat sasaran.
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan desa agar pelaksanaan Dana Desa lebih optimal di seluruh wilayah.
3. Masyarakat desa, agar lebih aktif berpartisipasi dan memahami pentingnya peran mereka dalam proses pembangunan dan pengawasan Dana Desa, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.